



**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
KOORDINASI PENGENDALIAN
INFLASI NASIONAL**

[10 MENIT]

disampaikan dalam acara

**Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Pengendalian Inflasi Tahun 2019**

**Hotel Grand Sahid Jaya Hotel
25 Juli 2019**

Yang kami hormati :

1. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Rekan-rekan Menteri Kabinet Kerja
3. Pimpinan Lembaga Negara
4. Para Gubernur
5. Para Walikota/Bupati
6. Para Undangan/Hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum wr. Wb

Salam sejahtera bagi kita semua

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden yang berkenan hadir untuk membuka dan memimpin langsung acara pagi ini. Kehadiran Bapak Wakil Presiden membuktikan komitmen besar Pemerintah untuk mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil.

Dalam kesempatan ini, ada dua hal yang ingin kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden. **Pertama**, evaluasi atas pengendalian inflasi tahun 2018 dan **Kedua**, tindak lanjut arahan Bapak Presiden di Rakornas sebelumnya.

Bapak Wakil Presiden dan Hadirin sekalian

[Slide 2]

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang diadakan pada hari ini adalah Rakornas kesepuluh. Sebagaimana Rakornas pada tahun-tahun sebelumnya, Rakornas dipimpin langsung oleh Presiden/Wakil Presiden dan merupakan forum tertinggi yang mengarahkan kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah.

Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), koordinasi pengendalian inflasi diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota. TPIP diketuai oleh kami sendiri dengan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebagai wakil ketua dengan anggota Menteri dan pimpinan lembaga terkait. Pada

tingkat daerah, TPID Provinsi maupun TPID Kabupaten/Kota diketuai oleh Kepala Daerah.

Dapat kami laporkan pada saat ini seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk TPID dengan jumlah keseluruhan sebanyak 542 TPID. Dalam pelaksanaan tugasnya, TPID berkoordinasi dengan TPIP.

Bapak Wakil Presiden dan Hadirin yang kami hormati

[Slide 3]

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 5,17 persen (yoy) pada tahun 2018 dan sebesar 5,07 persen (yoy) pada triwulan pertama 2019. Pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut diiringi dengan kualitas yang semakin membaik sebagaimana tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan serta inflasi yang rendah dan stabil.

Realisasi Inflasi pada empat tahun terakhir dapat dijaga pada kisaran 3 persen dengan laju inflasi tahun 2018 sebesar 3,13 persen (yoy) dan inflasi bulan Juni 2019 sebesar 3,28 persen (yoy). Pencapaian tersebut masih dalam rentang sasaran nasional sebesar 3,5 persen dengan deviasi 1 persen.

[Slide 4]

Secara komponen pembentukannya, inflasi harga bergejolak (*volatile food*) tahun 2018 sebesar 3,39 persen (yoy), namun pada Juni 2019 meningkat sebesar 4,91 persen (yoy). Sementara itu, inflasi inti masih terjaga dengan laju inflasi sebesar 3,07 persen (yoy) pada tahun 2018 dan 3,25 persen (yoy) pada Juni 2019. Sebaliknya, inflasi harga yang diatur pemerintah (*administered price*) menunjukkan penurunan signifikan dari sebesar 3,36 persen (yoy) pada tahun 2018 menjadi 1,89 persen (yoy) pada Juni 2019.

[Slide 5]

Meskipun secara keseluruhan inflasi tahun 2018 masih terjaga, namun secara spasial masih terdapat beberapa daerah yang realisasi inflasinya di luar sasaran inflasi nasional. Untuk tingkat provinsi terdapat lima provinsi berada di atas sasaran, sementara untuk tingkat kabupaten/kota IHK terdapat delapan kabupaten/kota berada di atas sasaran.

Bapak Wakil Presiden dan Hadirin sekalian

[Slide 6]

Terjaganya realisasi inflasi pada tahun 2018 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui implementasi strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif). Strategi 4K akan terus dilanjutkan untuk menjaga capaian inflasi tahun 2019 dengan fokus utama pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

[Slide 7]

Ke depan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun serta melakukan inovasi-inovasi pengendalian inflasi. Pembangunan jalan provinsi, kabupaten dan desa yang terkoneksi ke jalan tol perlu dibangun, sehingga pusat produksi terhubung langsung ke pasar. Selanjutnya, Pembangunan pasar-pasar pengumpul, penyediaan transportasi barang, pemanfaatan platform *e-commerce*, dan sistem pergudangan berbasis IT adalah sebagian upaya lain yang dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan.

Bapak Wakil Presiden dan Hadirin sekalian

[Slide 5]

Selanjutnya, dapat kami sampaikan beberapa arahan Presiden pada Rakornas 2018, antara lain:

1. Seluruh kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga diminta untuk benar-

benar memperhatikan pertumbuhan dan tekanan inflasi serta mempermudah dan membuka investasi yang berorientasi ekspor.

2. Kepala daerah harus memperhatikan pengendalian inflasi dari sisi pasokan pangan, distribusi, dan infrastruktur.
3. Aparat penegak hukum diharapkan turut andil dalam menjaga mekanisme pasar.
4. Pentingnya komunikasi antar daerah dalam mendorong perdagangan antar daerah.

Atas arahan tersebut, TPIP dan TPID telah melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Menyusun program kerja koordinasi pengendalian inflasi nasional tahun 2019 serta menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2019-2021. Peta Jalan Pengendalian Inflasi juga dibuat oleh seluruh TPID Provinsi.
2. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendorong daya saing dan investasi seperti mempermudah perizinan melalui OSS, pemberian insentif fiskal,

pengembangan industri berorientasi ekspor, upaya peningkatan investasi daerah dan penciptaan skema baru KUR pariwisata.

3. Pembangunan pasar induk beras dan sarana konektivitasnya di Pare-pare. Kedepan pembangunan pasar tersebut akan dilanjutkan.
4. Satgas pangan yang didalamnya terdapat unsur penegak hukum secara umum telah berkoordinasi dengan TPID, utamanya pada periode HBKN.
5. Beberapa TPID telah menginisiasi pembangunan pusat informasi harga pangan strategis. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) nasional saat ini juga sedang mengembangkan data pasokan untuk tingkat nasional.

Bapak Wakil Presiden dan Hadirin sekalian

[Slide 9]

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada hari ini juga telah diagendakan penyampaian TPID

Award. TPID *Award* ditujukan untuk memberikan motivasi sekaligus apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai telah berhasil dalam pengendalian inflasi pada tahun 2018.

Penghargaan akan diberikan kepada TPID tingkat provinsi, Kabupaten/Kota IHK dan Kabupaten/Kota Non IHK di lima wilayah yaitu: Sumatera; Jawa-Bali; Kalimantan; Sulawesi; serta Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Suatu kehormatan bagi kami jika Bapak Wakil Presiden berkenan menyerahkan penghargaan tersebut.

Demikian Laporan kami sampaikan. Selanjutnya, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Wakil Presiden untuk membuka sekaligus memimpin Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2019.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 25 Juli 2019

Darmin Nasution

Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat